



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YENNI APRIANA WULANDARI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN DAN PENUNJANG RSGMP
3. NHK : 738615

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.940.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/500 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
3. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
4. Tanah Seluas 7.168 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 8.219 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 186.500.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 232.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 199.301.348**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	4.558.301.348
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.558.301.348

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.